

Buntut DPRD Batal Sahkan APBD Perubahan, Maurits Siap Lakukan Pergeser Anggaran

Abdul Halik Harun - BITUNG.PUBLIKINDONESIA.COM

Oct 11, 2024 - 21:19



BITUNG, - Rapat Paripurna 30 September 2024, DPRD kota Bitung batal sahkan RAPBD Perubahan 2024. Hal itu tak membuat Walikota Bitung Ir. Maurits Mantiri MM diam. Diapun terus melakukan upaya mendapatkan Solusi

Seperti disampaikan Sekertaris Daerah Pemkot Bitung Rudy Theno, bahwa Pemerintah bersama dengan Ketua DPRD Bitung, Vivi Ganap dan Ketua-ketua Fraksi di DPRD Bitung melakukan konsultasi terkait keterlambatan pembahasan APBD Perubahan 2024 kepada Kemendagri.

Dalam Pertemuan, Kemendagri memberikan Kewenangan kepada Pemerintah dalam hal ini pak Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri untuk melakukan pergeseran Anggaran.

" Jadi Pemerintah melalui Tim APD diberi kewenangan oleh Kemendagri melakukan pergeseran anggaran untuk sejumlah Point (Urgen) sebagai berikut;

- Pertama memberikan kewenangan Pemerintah untuk segera melakukan penggeseran sesuai amanat undang-undang (UU).
- Kedua, TAPD segera melakukan, evaluasi APBD terhadap belanja belanja yang sifatnya mendesak sesuai aturan dan UU yang berlaku.
- Ketiga, menyampaikan surat pemberitahuan ke DPRD Bitung tentang pergeseran anggaran. Tapi, tidak bersama-sama dengan DPRD dalam pembahasan.

" Dalam penyusunan dan pembahasan pergeseran anggaran Pemkot Bitung diberikan kewenangan penuh Jadi DPRD tidak dilibatkan bahkan tidak bisa melakukan intervensi terkait hal itu." Kata Sekda (10/10/2024)

Rudy pu membeberkan, pergeseran anggaran yang bersifat mendesak atau urgen dimaksud seperti, Gaji ASN, THL, PALA dan RT. Sementara jelasnya belanja-belanja yang tidak bersifat mendesak seperti Perjalanan Dinas (Perjadin) DPRD Bitung akan dievaluasi.

" Termasuk makan Minum (Mami) yang dianggap tidak terlalu mendesak, Yang mendesak itu Gaji ASN, THL, Pala dan RT, Anggaran Kebersihan, Kesehatan, Pendidikan, termasuk Reses DPRD," Ungkapnya

Ditambahkannya, setelah TAPD selesai menyusun dan merumuskan belanja-belanja dalam pergeseran anggaran. Pihaknya, akan kembali mengkonsultasikan ke pemerintah provinsi dan Kemendagri untuk dievaluasi.

"TAPD secepatnya akan menyusun rumusan pergeseran anggaran. Semoga dalam waktu dekat itu bisa selesai," tutupnya. (AH)